

PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT SEBAGAI
UPAYA MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM

TESIS

Oleh :

FAHMI HASJMY
NIM. 992105074



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2002

Pendaftaran Tanah Hak Adat Sebagai Upaya Memperoleh
Kepastian Hukum
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)

Fahmi Hasjmy *)
Prof. Dahlan, S.H.,M.H **)
Sulaiman Ibrahim, S.H.,S.U **)
Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S ***

Undang-Undang Pokok Agraria. adalah undang-undang yang sifatnya nasional baik dari bentuk atau dari isinya, yang berorientasikan kepada dan membela kepentingan masyarakat dan mengubah secara mendasar hukum pertanahan lama yang bersifat dualisme yang sangat merugikan rakyat. Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 3 dan Pasal 4 untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak wajib didaftarkan. Kenyataannya di kota Banda Aceh tanah hak milik adat diketahui seluas 976.037 M² yang tersebar di Kecamatan dalam Kota Banda Aceh. Di Kecamatan Meuraxa dan Kecamatan Syiah Kuala tanah hak milik adat seluas 585.622,2 M² dan yang telah didaftarkan di kedua Kecamatan tersebut adalah seluas 175.686,66 M² atau 30 % dari luas tanah hak. milik adat yang ada di Kecamatan Meuraxa dan Syiah Kuala dengan jumlah subjek 351 orang.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik adat, faktor-faktor yang menyebabkan pendaftaran tanah hak milik adat belum berjalan sebagaimana yang diharapkan dan cara yang ditempuh aparatur pemerintah dalam hal pendaflaran tanah hak milih adat untuk mewujudkan kepastian hukum, tertib penggunaan tanah dan tertib administrasi pertanahan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara a.kurat mengenai pendaftaran tanah dan dianalisis dari segi hukum dan peraturan yang berhubungan dengan pendaftaran tanah. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan mengedarkan kuesioner dan dilengkapi podoman wawancara langsung dengan 30 responden di dua

*) Pegawai Sekda Proyinsi Nanggroe Aceh Darussalam

**) Fakultas Hukum, Universsitas Syiah Kuala - Banda Aceh

***)Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara - Medan

Kecamatan yaitu Kecamatan Meuraxa dan Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh sebagai data primer. Disamping itu dilakukan juga wawancara yang mendalam dengan para informan guna mendapatkan data pendukung dari data primer. Data skunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data skunder dan primer yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan kemudian dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif setelah terlebih dahulu data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang berupa angka ditabulasikan dalam bentuk tabel, kemudian dibahas dengan membandingkan sesuai dengan teori-teori hukum agraria.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik adat belum berjalan sebagaimana mestinya. Adapun kendala dari pihak pemilik tanah; yaitu kurang memahami fungsi sertifikat hak atas tanah sebagai akibat rendahnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan pemilik tanah akibat kurangnya penyuluhan dari pihak Kantor Pertanahan, biaya mahal proses yang lama dalam pengurusan sertifikat dan adanya anggapan bahwa hukum adat masih cukup kuat mengatur masalah pertanahan. Cara penyelesaian yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional meningkatkan penyuluhan dan memberi kemudahan dalam hal pembayaran biaya pendaftaran. Faktor kendala dari pihak aparat pemerintah yaitu tidak ada bukti tertulis kepemilikan hak atas tanah dari pemilik tanah, terbatas tenaga pelaksana pendaftaran, kurangnya dana penyuluhan.

Disarankan jika hambatan dan kendala dari pemilik tanah maka Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh perlu mengambil langkah penyempurnaan pensertipikatan hak atas tanah, untuk itu hendaknya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan tentang surat bukti kepemilikan hak milik adat cukup dengan surat keterangan kepala desa yang diketahui oleh catnat setempat.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Hak Milik Adat menjamin kepastian hukum.

ABSTRACT

Custom Right Land Registration As Means To Have Law Assurance (A Research in Banda Aceh)

Fahmi Hasjmy *)
Prof. Dahlan, S.H., M.H. **)
Sulaiman Ibrahim, S.H., S.U. **)
Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S. ***)

The Indonesian Agrarian Act is a nationally law of contents and forms that oriented to and care for community and principally to change the dualism of the old land law that makes them suffered. In Article 19 (1) of the Agrarian Act and the Government Regulation No. 24 of 1997 to guarantee the law assurance and law protection for the right owners of land to prove themselves easily. In fact, the width of custom right land in Banda Aceh is 976.037 M² that spreads on some sub-districts. It is 585.622,2 M² in Kecamatan Meuraxa and Kecamatan Syiah Kuala with 175.686,66 M² or about 30% registered custom right land of 351 subjects.

The aim of this research is to know and explain about custom right land registration will be carried out, about factors that cause why the custom land is not work as hope and what ways should be done by the government apparatus on custom right land registration to make law assurance, land-using rules and land administration.

This research is made in descriptive analysis to describe exactly about land registration by using empirical and normative juridical approach methods. To achieve this, so the research has a primary data by giving questionnaire and directive interview with 30 respondents in Kecamatan Meuraxa and Kecamatan. Syiah Kuala in Banda Aceh.

-
- *) Regency Secretariat officer of Province Nanggroe Aceh Danissalam
**) Law Faculty of Syiah Kuala University Banda Aceh
***) Law Faculty of North Sumatera University - Medan

Beside that, making a thoughtful interview with some informants to have a support data of primary data. The secondary data is taken from Peraturan Perundang-Undangan and study of literature that has connection with this research. The collected primary and secondary data of the field research was qualitatively analyzed and descriptively prepared before classifying the data like the research problems. Then the numeric data has made in table to analyze by comparing with agrarian law theories.

This research indicates that the realization of custom right land registration is not going on as hope. The constraints of landlord is low understanding about the function of land right certificate as consequent of low education and low understanding of the landlord as consequent of low illumination from Kantor Pertanahan, the high cost, long time of making certificate process and the opinion that custom law is strong enough to organize the land problems. To overcome the problems, BPN makes more illumination and makes the system of registration cost easier. The constraint of the official is about no evidence of community right land from the landlords, besides the problem of registration staff that is confined, minimal illumination fund.

To constraint of landlord, it is a good idea for BPN Kota Banda Aceh to make perfection method of the right land, in order to realize it, it should be oriented to Government Regulation No 24 of 1997, Agrarian State Minister Rules / Chief of BPN No. 3 of 1997 and about certificate of custom right land is sufficient by chief of village statement that have been coordinated by chief of local sub-district.

Keyword: Custom right land registration guarantees law assurance

